



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya diubah lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2/E );
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL);
  - f. Laporan Operasional; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp887.592.875.418,26	
b. Belanja	<u>Rp808.163.334.616,20</u>	
Surplus		Rp79.429.540.802,06
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 74.428.815.562,03	
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	
Pembiayaan Nett		<u>Rp. 74.428.815.562,03</u>
SiLPA		Rp.153.858.356.364,09

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.300.164.663,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp903.893.040.082,00
b. Realisasi	<u>Rp887.592.875.418,26</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 16.300.164.663,74

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp170.440.071.027,83 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp978.603.405.644,03
b. Realisasi	<u>Rp808.163.334.616,20</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp170.440.071.027,83

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp154.139.906.364,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 74.710.365.562,03)
b. Realisasi	<u>Rp 79.429.540.802,06</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp154.139.906.364,09

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp281.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 74.710.365.562,03
b. Realisasi	<u>Rp 74.428.815.562,03</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 281.550.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp281.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 74.710.365.562,03
b. Realisasi	<u>Rp 74.428.815.562,03</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 281.550.000,00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.854.700.503.869,50
b. Jumlah kewajiban	Rp	21.977.364.887,81
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.832.723.138.981,69

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp	74.410.365.562,03
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	198.624.194.338,92
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp)	119.194.653.536,86
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	18.450.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	64.873.412,86

- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun Rp 153.863.614.546,95  
2018

#### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Huruf d sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.765.251.281.258,55
b. Surplus / (Defisit) – LO	Rp 52.061.044.407,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Rp. 15.240.683.154,10</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 1.832.553.008.820,02

#### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp 74.410.365.562,03
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 74.410.365.562,03</u>
Jumlah (a-b)	Rp 0,00
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Jumlah (a-b) + c	Rp 153.858.356.364,09
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 153.858.356.364,09

#### **Pasal 8**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :	
Pendapatan LO	Rp. 868.460.147.135,36
Beban	<u>Rp 816.147.022.227,99</u>
Surplus dari Operasi	Rp 52.313.124.907,37
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	
Surplus/Defisit non operasional	Rp 0,00
c. Pos Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	<u>(Rp 252.080.500,00)</u>
d. Surplus / (Defisit) LO	Rp 52.061.044.407,37

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I    | Laporan realisasi anggaran   |
|    | Lampiran I.1  | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi   |
|    | Lampiran I.2  | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
|    | Lampiran I.3  | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
|    | Lampiran I.4  | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
|    | Lampiran I.5  | Daftar piutang daerah;   |
|    | Lampiran I.6  | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  |
|    | Lampiran I.7  | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;   |
|    | Lampiran I.8  | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  |
|    | Lampiran I.9  | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;                                       |
|    | Lampiran I.10 | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
|    | Lampiran I.11 | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.  |
| b. | Lampiran II   | Neraca;  |
| c. | Lampiran III  | Laporan Arus Kas;  |
| d. | Lampiran IV   | Laporan Perubahan Ekuitas;   |
| e. | Lampiran V    | Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;   |
| f. | Lampiran VI   | Laporan Operasional;   |

**Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

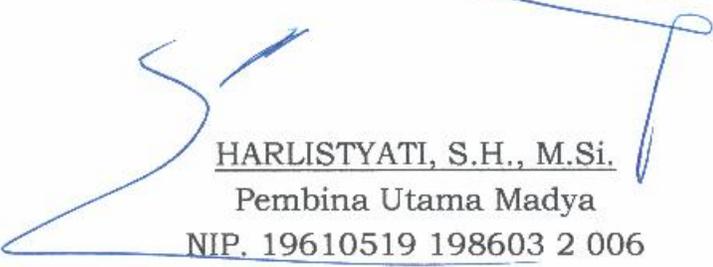
Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Juli 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



**IKA PUSPITASARI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 12/A  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :  
139-12/2019